

## PERAN ADOPTSI IPSAS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN TERHADAP LEVEL KORUPSI (STUDI PADA PROVINSI DI INDONESIA)

M. Agus Sudrajat<sup>1)</sup>, Yolanda Dhamayanti<sup>2)</sup>, Annisa Ayundra Safira<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas PGRI Madiun, Jl. Setiabudi 85 Madiun, Indonesia.

Email: \* [agus.sudrajat@unipma.ac.id](mailto:agus.sudrajat@unipma.ac.id)

### Abstrak

Tujuan dari riset ini adalah untuk menganalisis peran Adopsi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS), serta transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan terhadap level korupsi pada Provinsi di Indonesia. Penelitian memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan dari 38 Pemerintah daerah Provinsi yang ada di Indonesia, Laporan Hasil Pemantauan Korupsi dari ICW, dan data primer berupa persepsi akuntan di masing-masing pemerintah daerah mengenai akuntabilitas dan transparansi kinerja keuangan. teknik sampling jenuh untuk memilih dan mengambil sampel. Oleh karena terdapat ketidaklengkapan data di 2 provinsi, maka total sampel menjadi 36 Provinsi. Peneliti memanfaatkan analytical approach untuk memecahkan masalah yaitu analisis regresi berganda. Novelty yang digagas bahwa penelitian ini pengolahan data primer dan sekunder secara bersamaan, dimana hal ini belum dilakukan oleh penelitian sejenis terdahulu. Perbedaan karakteristik pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang terlibat dalam penelitian tentunya mempengaruhi kemampuan dan kesiapan mengadopsi IPSAS secara penuh.

Hasil riset menunjukkan bahwa adopsi IPSAS pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia berperan menurunkan level korupsi secara parsial maupun simultan bersama dengan transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan. Adopsi IPSAS dengan orientasi basis accrual mempedomani pengungkapan yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan basis kas. Laporan dengan pengungkapan informasi penuh sebagai syarat transparansi fiskal akan mengurangi ruang untuk manipulasi angka dan menyulitkan penyembunyian transaksi koruptif. Hasil riset mengimplikasikan bahwa adopsi IPSAS dapat menciptakan nilai bagi pemerintah provinsi, meningkatkan keterbukaan financial yang bermuara pada pengurangan level korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Adopsi IPSAS, Transparansi, Akuntabilitas, Level Korupsi, Basis Akrual.



Copyright at Authors, this works is licensed under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN

Korupsi tetap menjadi salah satu masalah utama yang menghambat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index* — CPI) menunjukkan posisi Indonesia yang masih relatif rendah dibandingkan negara lain yaitu dengan skor CPI sebesar 37/100, serta menduduki ranking 99 dari 180 negara (Transparency International, 2024). Demikian mencerminkan tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, data penindakan Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dipublikasikan oleh lembaga pengawas KPK menunjukkan adanya jumlah perkara yang signifikan setiap tahun. Tabel 1 berikut menyajikan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan jenis perkara selama 6 tahun terakhir:

**Tabel 1. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara**

Jenis Perkara	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pengadaan Barang/Jasa/KN	27	30	14	62	68	21
Perizinan	0	2	0	3	0	0
Gratifikasi/Penyuapan	55	65	100	85	63	16
Pungutan/Pemerasan	0	0	1	1	16	6
Penyalahgunaan Anggaran	6	3	0	0	0	0
TPPU	3	7	5	8	6	0

Merintangi Proses KPK	0	1	0	2	1	0
<b>JUMLAH</b>	<b>91</b>	<b>108</b>	<b>120</b>	<b>161</b>	<b>154</b>	<b>43</b>

Sumber: (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

Fenomena tersebut menegaskan kebutuhan mendesak akan implementasi mekanisme tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu intervensi kebijakan yang mendukung mekanisme tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel adalah adopsi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). (Ademola et al., 2019; Rompotis & Balios, 2025; Sari, 2024) sepakat bahwa penerapan IPSAS berpotensi memperbaiki transparansi laporan keuangan dan memperkuat mekanisme akuntabilitas publik. IPSAS menuntut pelaporan berbasis akrual pengungkapan yang lebih komprehensif, dan penggunaan pengukuran keuangan yang lebih seragam. Demikian sehingga penyajian informasi yang lebih lengkap, handal, dan standar pengukuran yang seragam sehingga laporan keuangan pemerintah menjadi lebih informatif dan dapat dibandingkan (Schmidhuber et al., 2022).

Informasi yang mudah dipahami, relevan, andal serta dapat dibandingkan merupakan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ketika karakteristik kualitatif utama laporan keuangan terpenuhi, maka transparansi laporan keuangan sebagai prinsip mendasar dapat dicapai (Castañeda-Rodríguez, 2022). Transparansi laporan keuangan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif oleh publik, auditor eksternal, dan lembaga legislatif. Transparansi menjadikan akuntabilitas laporan keuangan lebih terukur. Akuntabilitas adalah prinsip yang membuat pengelola dana (dalam riset yaitu sektor publik) bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan keuangan mereka yang telah diungkapkan secara transparan (Bakre et al., 2022). Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan akan membatasi ruang kesempatan untuk penyalahgunaan. Selanjutnya insentif individu untuk melakukan korupsi melemah, sehingga diharapkan level korupsi turun (Cuadrado-Ballesteros et al., 2020). Berdasarkan logika berpikir tersebut, hipotesis 1 yang diajukan pada riset ini yaitu:

H1: Adopsi IPSAS berpengaruh negatif terhadap level korupsi pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

Konsep akuntabilitas dan transparansi menuntut sektor publik menyampaikan informasi laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka dalam mengelola sumber daya publik. Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi berbanding lurus dengan peningkatan anti-korupsi (Koller et al., 2020). Korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, mencakup suap dan sogokan, penggelapan, penipuan didorong oleh faktor tingkat individu dan sistem seperti tekanan finansial, buruknya manajemen konflik kepentingan, lemahnya sistem regulasi dan penegakan hukum (Vian, 2020). (Hunter et al., 2020; Kohler & Dimancesco, 2020; Wierzynska et al., 2020) menyepakati akuntabilitas dan transparansi sebagai mekanisme anti-korupsi. Sedangkan riset lainnya mengukur akuntabilitas melalui opini auditor atas laporan keuangan organisasi sektor publik, sehingga tidak menjamin bahwa akuntabilitas menjadi mekanisme untuk mengurangi risiko korupsi. Hal tersebut karena opini audit bukanlah sebagai pengurang risiko namun sebagai evaluasi atas laporan keuangan sesuai hubungan antar data keuangan (Warkini et al., 2021). Berdasarkan logika berpikir tersebut, hipotesis 2 yang diajukan pada riset ini yaitu:

H2: Akuntabilitas dan transparansi kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap level korupsi pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

Meskipun riset terdahulu telah menelaah hubungan antara adopsi IPSAS terhadap upaya penurunan korupsi di negara berkembang maupun lintas negara (Cuadrado-Ballesteros et al., 2020; Dzakwan et al., 2023; Saud & Furqan, 2024; Tawiah, 2023); menelaah hubungan peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengurangan korupsi (Bauhr & Grimes, 2017; Brusca et al., 2018; Ejiogu et al.,

2019; Warkini et al., 2021) dengan hasil riset yang bervariasi, namun masih terdapat celah yaitu masih sedikit studi yang menguji model kausal terintegrasi yang menghubungkan adopsi IPSAS, transparansi pelaporan, akuntabilitas kinerja, dan level korupsi secara bersamaan dalam konteks Indonesia. Demikian novelty riset ini adalah mengisi celah tersebut untuk memperkaya referensi dari variasi hasil riset kausal terintegrasi pengaruh adopsi IPSAS, transparansi dan akuntabilitas terhadap level korupsi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dikembangkan dengan pendekatan kuantitatif dan didesain sebagai penelitian kausalitas. Penelitian akan melibatkan 38 Pemerintah daerah Provinsi yang ada di Indonesia. Data penelitian meliputi data sekunder berupa Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Laporan Realisasi Anggaran PPKD, LKPD Auditan, Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Pemantauan Korupsi dari Indonesia Corruption Watch, serta data primer berupa persepsi akuntan di masing-masing instansi pemerintah daerah provinsi mengenai akuntabilitas dan transparansi kinerja keuangan. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan dokumentasi, sedangkan data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Pemilihan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Penelitian berfokus untuk menganalisis dampak Adopsi IPSAS serta transparansi dan akuntabilitas terhadap level korupsi di Indonesia terutama pada pemerintah provinsi.

Variabel yang diteliti meliputi variabel dependen yaitu level korupsi, variabel independent yaitu adopsi IPSAS, serta akuntabilitas dan transparansi. Adopsi IPSAS dihitung dengan rumus sebagaimana penelitian (Setyawan et al., 2023):

$$\text{Indeks Pengukuran Pengungkapan} = \frac{\text{Jumlah pengungkapan pemprov sesuai elemen IPSAS}}{\text{Total item pengungkapan IPSAS}}$$

Variabel level korupsi diukur berdasarkan jumlah nominal kasus korupsi di masing-masing pemerintah daerah provinsi sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Hasil Pemantauan Korupsi oleh *Indonesia Corruption Watch*. Selanjutnya variabel akuntabilitas dan transparansi diukur dari persepsi akuntan dengan melibatkan indikator yang digunakan oleh (Ademola et al., 2017; Williams & Hussein, 2019) yaitu: a) pendapatan yang dihasilkan dicatat melalui IPSAS; b) semua pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah dianggarkan untuk semua pendapatan dianggarkan yang dikumpulkan; c) Jumlah pasti yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah apa yang harus dipertanggungjawabkan; d) tidak ada kebocoran pendapatan pemerintah; e) proses hukum yang berlaku dalam diikuti dalam pengeluaran pemerintah; f) penghargaan proyek sangat dihargai; g) catatan yang tepat disimpan untuk biaya, h) pembayaran uang muka pemerintah diperhitungkan; i) pemanfaatan sumber daya publik yang lebih baik didorong oleh IPSAS. Lima skala Likert digunakan untuk memberikan skor atas respon untuk masing-masing pernyataan terkait persepsi responden atas **akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah**.

Dalam rangka memastikan bahwa alat ukur penelitian yaitu kuesioner, dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer yang akurat, tepat, dan dapat diandalkan maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Instrumen yang valid adalah jika nilai  $r$  hitung (hasil Pearson Product Moment) > nilai  $r$  tabel (Ghozali, 2021). Kemudian kriteria penilaian uji reliabilitas adalah jika Cronbach Alpha  $\geq 0,70$  maka instrument disimpulkan reliabel (Zahriyah et al., 2021). Selanjutnya, data dianalisis dengan analisis statistik deskriptif meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standard deviasi. Uji asumsi klasik sebagai prasyarat agar estimasi model tidaklah bias. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dengan prasyarat nilai signifikansi di atas 0,05; uji autokorelasi (dengan prasyarat nilai  $D_u < D_w < 4 - D_u$ ); uji heteroskedastisitas (dengan prasyarat nilai signifikansi di atas 0,05); dan uji multikolinearitas (dengan prasyarat nilai VIF < 10, nilai Tolerance > 0,01) (Ghozali & Latan, 2015; Zahriyah et al., 2021).

Setelah model regresi memenuhi uji asumsi klasik, kemudian data akan dianalisis regresi berganda meliputi uji koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik t. Uji koefisien determinasi untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali & Latan, 2015). Besar koefisien determinasi dilihat dari nilai adjusted R2, jika adjusted R2 semakin besar maka kemampuan variabel independent mempengaruhi variabel dependen semakin besar juga. Uji statistic F selain untuk melihat pengaruh simultan variabel independent terhadap variabel dependen, juga untuk memastikan goodness of fit dari model regresi. Kriteria penilaian dari uji statistik F yaitu jika  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$  disimpulkan bahwa hipotesis alternatif diterima, demikian sebaliknya. Sedangkan, kriteria penilaian dari uji statistik t adalah jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  disimpulkan bahwa hipotesis alternatif diterima yang menandakan variabel independent secara parsial mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Uji validitas untuk mengetahui sejauh mana alat ukur (kuesioner) dapat mengukur apa yang diukur, dimana kriteria penilaian atas uji validitas jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka disimpulkan item kuesioner valid (Ghozali, 2021). Nilai signifikansi *Pearson Corellation*  $< 0,05$  juga menandakan item kuesioner valid. Hasil uji validitas kuesioner untuk variabel transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sebagai tersaji pada tabel 1 berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan uji Reliabilitas Item Kuesioner**

Variabel	Pernyataan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Variabel transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah X2	X2.1	0,542	0,000	Valid	0,876	Reliabel
	X2.2	0,826	0,000	Valid		
	X2.3	0,756	0,000	Valid		
	X2.4	0,733	0,000	Valid		
	X2.5	0,734	0,000	Valid		
	X2.6	0,800	0,000	Valid		
	X2.7	0,807	0,000	Valid		
	X2.8	0,675	0,000	Valid		
	X2.9	0,562	0,000	Valid		

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2025

Berdasarkan tabel r (Ghozali, 2021) diketahui nilai  $r_{tabel}$  untuk  $df = (N-2) = (36-2) = 34$ , dengan tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 0,339. Tabel 2 merekap nilai  $r_{hitung}$  dan nilai signifikansi output uji validitas yang kesimpulannya adalah masing-masing item kuesioner untuk setiap variabel dinyatakan valid. Demikian karena nilai  $r_{hitung}$  untuk semua item lebih besar dari 0,1577 serta nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Selain diuji validitas, kuesioner juga harus melewati pengujian reliabilitas untuk memastikan konsistensi dan stabilitas instrument (kuesioner) saat mengumpulkan data (Zahriyah et al., 2021). Kriteria pengujian reliabilitas adalah jika nilai Cronbach Alpha yang dihasilkan  $\geq 0,70$  maka instrument dikatakan reliabel (Gaur & Gaur, 2009). Tabel 2 merekap hasil bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk setiap variabel sebesar lebih dari 0,70 sehingga instrument (kuesioner) riset telah reliabel.

Statistik deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik data utama (dari hasil tanggapan responden).

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	36	1.100.000.000	285.712.533.112	64.435.399.471	78.932.477.517
X1 (Adopsi IPSAS)	36	0,318	0,887	0,55809	4,93670
X2 (Transparansi & Akuntabilitas Pemda)	36	20	45	36,625	4,9367
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2025

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai sebaran data dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis, variabel X1 yaitu Adopsi IPSAS memiliki nilai minimum 0,318 dan maksimum 0,887 dengan rata-rata sebesar 0,55809 dan standard deviasi 4,93670. Sesuai dengan hasil tersebut berarti data mengenai indeks pengungkapan telah bervariasi/ heterogen. Kemudian X2 yaitu Transparansi & Akuntabilitas Pemda memiliki nilai rata-rata 36,625 dengan simpangan baku 4,9367 yang mengindikasikan bahwa data variabel ini homogen, mengingat nilai simpangan baku yang lebih kecil dari nilai rata-rata (mean). Sedangkan untuk variabel Y yaitu level korupsi yang diprosikan dengan nominal kasus korupsi di masing-masing pemerintah provinsi memiliki nilai maksimum sebesar Rp 285.712.533.112, nilai minimum Rp 1.100.000.000, nilai mean Rp 64.435.399.471, serta nilai standard deviasi sebesar Rp 78.932.477.517. Demikian data tentang nominal korupsi yang terjadi di masing-masing pemerintah provinsi telah bervariasi.

Secara keseluruhan, keempat variabel dalam penelitian menunjukkan pola distribusi yang wajar tanpa indikasi penyimpangan ekstrem. Kondisi ini memberikan dasar yang memadai untuk melakukan analisis lebih lanjut. Tahapan selanjutnya mencakup pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, guna memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria kelayakan untuk dianalisis lebih mendalam.

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas dengan One Sample Kolmogorof Smirnov**

		Unstandardized Residual
<b>N</b>		36
	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,116
<b>Normal Parameter</b>		
<b>Test Statistic</b>		0,116
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2025

Asumsi normalitas terpenuhi, yaitu tampak pada tabel 4 nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 (nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05). Kesimpulannya bahwa data residual berdistribusi normal sehingga data layak untuk digunakan dalam analisis regresi lebih lanjut.

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

		Coefficients		Keterangan
		Collinearity Statistics		
	Model	Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	X1(Adopsi IPSAS)	0,965	1,036	Bebas Multikolinearitas
	X2 (Transparansi & Akuntabilitas Pemda)	0,965	1,036	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2025

Tabel 5 merekap hasil nilai tolerance untuk variabel X1 (Adopsi IPSAS) dan variabel X2 (Transparansi & Akuntabilitas) masing-masing sebesar 0,965. Nilai tersebut lebih besar daripada ambang minimum 0,10. Sedangkan nilai VIF untuk variabel X1 dan variabel X2 sebesar 1,036, dimana nilai ini lebih kecil dari ambang maksimum 10. Demikian model penelitian terbebas dari problem multikolinieritas sehingga model layak untuk dianalisis lebih lanjut.

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

		Correlations	
			Unstandardized Residual
Spearman's rho	X1 (Adopsi IPSAS)	Sig. (2-tailed)	0,910
	X2 (Transparansi & Akuntabilitas)	Sig. (2-tailed)	0,789
	Unstandardized Residual	Sig. (2-tailed)	0,000

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas Spearman pada tabel 6, variabel X1 (Adopsi IPSAS) dan variabel X2 (Transparansi & Akuntabilitas) masing-masing memiliki nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,910 dan 0,789. Nilai tersebut melebihi ambang signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel independen tersebut dengan residual. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas.

**Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson**

Model Summary			
Model	Du	Durbin-Watson	4-Du
1	1,5872	1,642	2,4128

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2025

Hasil uji Durbin-Watson pada model regresi menunjukkan nilai DW sebesar 1,642. Sesuai tabel DW (Ghozali, 2021) nilai Du untuk n=36 dan K = 2 adalah sebesar 1,5872 sehingga nilai 4 - Du (yaitu 4 - 1,770 = 2,4128). Nilai DW berada diantara nilai Du dan 4-Du maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif pada residual model.

**Tabel 8. Nilai Koefisien Determinasi Model Regresi Berganda**

Model	R square	Adjusted R Square
1	0,960	0,957

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2025

Nilai Adjusted R Square menunjukkan penyesuaian terhadap jumlah variabel bebas dan sampel, yang tetap menunjukkan kekuatan model prediktif yang sangat baik. Nilai R square = 0,957 menunjukkan bahwa 95,7% variasi dalam variabel Y (level korupsi) dapat dijelaskan oleh kombinasi kedua variabel independen yaitu adopsi IPSAS (X1), dan Transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah (X2). Model regresi ini cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, dengan hanya sekitar 4,3% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model riset.

**Tabel 9. Nilai Koefisien Regresi dan Nilai t Statistik**

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Hipotesis
	B	Std.Error			
Constant	26,039	0,090	288,139	0,000	
X1(KM)	-1,931	0,097	-19,883	0,000	Diterima
X2 (PK)	-1,698	0,128	-13,319	0,000	Diterima

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2025

Analisis regresi berganda untuk menjawab pertanyaan mengenai pengaruh Adopsi IPSAS (X1), Transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah (X2) terhadap level korupsi pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Dari pengolahan data diperoleh informasi nilai Beta unstandardized coefficients sehingga dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 26,039 - 1,931X_1 - 1,698X_2 + e$$

Persamaan regresi tersebut menyajikan informasi nilai konstanta yang dapat dimaknai ketika X1, X2 bernilai 0 maka level korupsi bernilai 26,039. Kemudian, peningkatan X1 (Adopsi IPSAS) sebesar 1 satuan akan mempengaruhi penurunan Y (level korupsi) senilai 1,931. Peningkatan X2 (Transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah) sebesar 1 satuan akan mempengaruhi penurunan Y (level korupsi) senilai 1,698. Sesuai nilai Beta unstandardized coefficients ini juga dapat diketahui bahwa diantara kedua variabel independent tersebut variabel X1 (Adopsi IPSAS) menjadi variabel dominan yang berpengaruh terhadap penurunan Y (level korupsi).

Hasil uji-t statistik menunjukkan variabel X1 (Adopsi IPSAS) mempunyai nilai -t hitung < -t tabel yaitu  $-19,883 > -2,02809$  serta nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai *t* tabel dapat dilihat pada lampiran *t* tabel (Ghozali, 2021). Hasil tersebut sesuai kriteria pengujian hipotesis, sehingga **H1 diterima**. Adopsi IPSAS berpengaruh negatif terhadap level korupsi pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

Selanjutnya untuk variabel X2 (Transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah), nilai -*t* hitung < -*t* tabel yaitu  $-13,319 > -2,02809$ . Hasil tersebut sesuai kriteria pengujian hipotesis, sehingga **H2 diterima**. Transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap level korupsi pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

## PEMBAHASAN

**Adopsi IPSAS berpengaruh negatif terhadap level korupsi pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia.** IPSAS sebagai landasan transformasi akuntansi mendukung *global best practice* terutama pada sektor publik dan pemerintahan (Baskerville & Grossi, 2019; Setyawan et al., 2023) dikenal sebagai *New Public Financial Management* yang berfokus pada pergeseran basis kas menuju basis akrual (Bisogno & Cuadrado-Ballesteros, 2022). Akuntansi akrual memberikan informasi lebih baik tentang solvabilitas pemerintah dan lebih banyak digunakan untuk menentukan biaya pelayanan publik (Bisogno & Cuadrado-Ballesteros, 2022; Cuadrado-Ballesteros & Bisogno, 2021). Adopsi IPSAS mendorong penerapan pengakuan berbasis akrual, pelaporan keuangan yang lebih lengkap dan sistematis, serta transparansi yang lebih tinggi. Ketika informasi keuangan publik menjadi lebih terbuka dan dapat diaudit, peluang bagi pejabat untuk menyalahgunakan anggaran atau menyembunyikan transaksi koruptif akan menurun (Saputra & Setiawan, 2021). Riset ini menguatkan riset terdahulu oleh (Cuadrado-Ballesteros et al., 2020; Ezejiofor et al., 2020; Scannell & Tawiah, 2024; Tawiah, 2023) bahwa penerapan IPSAS mengurangi tingkat korupsi di negara-negara OECD serta negara berkembang karena meningkatkan pengungkapan informasi dari politisi kepada warga negara. IPSAS menjadi penghambat potensial terjadinya korupsi karena dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan tepat waktu (Benito et al., 2007).

**Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap level korupsi pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia.** Konsep akuntabilitas dan transparansi menuntut sektor publik menyampaikan informasi laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka dalam mengelola sumber daya publik. Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi berbanding lurus dengan peningkatan anti-korupsi (Koller et al., 2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah berpotensi menurunkan level korupsi karena keterbukaan publik terhadap informasi keuangan dan aktivitas pemerintahan mempersempit ruang opasitas dan menambah kemampuan masyarakat serta pengawas eksternal untuk mendeteksi

penyimpangan. Akuntabilitas mendorong aparat dan lembaga publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas keputusan dan alokasi sumber daya, sehingga mengurangi peluang dan insentif pejabat untuk melakukan tindakan koruptif. (Sutaryo & Tri Amanu, 2020) menyatakan transparansi informasi pemerintah daerah berhubungan erat dengan pengendalian korupsi di tingkat daerah. transparansi dan akuntabilitas bukan sekedar elemen normatif *good governance*, namun juga sebagai mekanisme preventif dalam menekan korupsi di tingkat pemerintahan provinsi di Indonesia (Arsyad & Arifin, 2025). Hasil riset ini mendukung (Hunter et al., 2020; Kohler & Dimancesco, 2020; Wierzynska et al., 2020) menyepakati akuntabilitas dan transparansi sebagai mekanisme anti-korupsi.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa **adopsi IPSAS, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap level korupsi pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia**. Implementasi IPSAS mendorong peningkatan kualitas pelaporan keuangan berbasis akrual serta pengungkapan informasi yang lebih komprehensif, sehingga mempersempit ruang manipulasi dan praktik penyalahgunaan anggaran. Selaras dengan itu, peningkatan transparansi menjadikan informasi publik lebih mudah diakses dan diawasi, sementara akuntabilitas memperkuat mekanisme pertanggungjawaban atas keputusan dan penggunaan sumber daya publik. Secara simultan, Adopsi IPSAS serta transparansi dan akuntabilitas membentuk sistem tata kelola yang lebih terbuka, terawasi, dan bertanggung jawab, sehingga mampu meminimalkan peluang tindakan koruptif. Dengan demikian, semakin tinggi kualitas adopsi IPSAS, transparansi, dan akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah daerah, maka semakin rendah tingkat korupsi yang terjadi dalam pengelolaan pemerintahan.

Saran praktis bagi pemerintah daerah yaitu untuk mempercepat implementasi IPSAS melalui peningkatan kompetensi aparatur (pelatihan akrual, sertifikasi), pembenahan sistem informasi akuntansi, serta penyusunan SOP teknis yang selaras dengan standar internasional. Sedangkan saran bagi penelitian lebih lanjut yaitu memperluas objek pada tingkat kabupaten/kota atau melakukan perbandingan antarregional untuk menguji konsistensi temuan. Selain itu, studi lanjutan dapat mengeksplorasi peran moderasi atau mediasi Transparansi dan akuntabilitas pada pengaruh adopsi IPSAS terhadap level korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ademola, A. O., Ben-Caleb, E. , Madugba, J. U., Adegboyegun, A. E., & Eluyela, D. F. (2019). International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Adoption and Implementation in Nigerian Public Sector. *International Journal of Financial Research*, 11(1), 434. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n1p434>
- Ademola, A. O., Kolawole, A. A., & Olufunke, O. (2017). Impact of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Adoption on Financial Accountability in Selected Local Governments of Oyo State, Nigeria. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 3(2), 1–9. <https://doi.org/10.9734/AJEBA/2017/33866>
- Arsyad, R. M., & Arifin, J. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencegahan Tindak Korupsi di Inspektorat DKI Jakarta. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 112–119.
- Bakre, O. M., McCartney, S., & Fayemi, S. O. (2022). Accounting as a technology of neoliberalism: The accountability role of IPSAS in Nigeria. *Critical Perspectives on Accounting*, 87, 102282. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2020.102282>
- Baskerville, R., & Grossi, G. (2019). Glocalization of accounting standards: Observations on neo-institutionalism of IPSAS. *Public Money & Management*, 39(2), 95–103. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1580894>
- Bauhr, M., & Grimes, M. (2017). Transparency to curb corruption? Concepts, measures and empirical merit. *Crime, Law and Social Change*, 68(4), 431–458. <https://doi.org/10.1007/s10611-017-9695-1>

- Benito, B., Brusca, I., & Montesinos, V. (2007). The harmonization of government financial information systems: the role of the IPSASs. *International Review of Administrative Sciences*, 73(2), 293–317. <https://doi.org/10.1177/0020852307078424>
- Bisogno, M., & Cuadrado-Ballesteros, B. (2022). Budget transparency and governance quality: a cross-country analysis. *Public Management Review*, 24(10), 1610–1631. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1916064>
- Brusca, I., Manes Rossi, F., & Aversano, N. (2018). Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 20(5), 486–504. <https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1393951>
- Castañeda-Rodríguez, V. (2022). Is IPSAS Implementation Related to Fiscal Transparency and Accountability? *BAR - Brazilian Administration Review*, 19(1). <https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2022210071>
- Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2021). Public sector accounting reforms and the quality of governance. *Public Money & Management*, 41(2), 107–117. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1724665>
- Cuadrado-Ballesteros, B., Citro, F., & Bisogno, M. (2020). The role of public-sector accounting in controlling corruption: an assessment of Organisation for Economic Co-operation and Development countries. *International Review of Administrative Sciences*, 86(4), 729–748. <https://doi.org/10.1177/0020852318819756>
- Dzakwan, A., Syarifuddin, & Amiruddin. (2023). Akuntansi, Budaya, dan Korupsi: Sebuah Studi Antar Negara. *Al-Buhuts*, 19(1), 197–217.
- Ejiogu, A., Ejiogu, C., & Ambituuni, A. (2019). The dark side of transparency: Does the Nigeria extractive industries transparency initiative help or hinder accountability and corruption control? *The British Accounting Review*, 51(5), 100811. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2018.10.004>
- Ezejiogor, R. A., Okolocha, B. C., & Ofurum, D. I. (2020). Adoption of International Public Sector Accounting Standards in Curbing Corrupt Practices in Nigerian Public Sector. *Himalayan Economics and Business Management*, 1(1), 34–39.
- Gaur, A. S., & Gaur, S. S. (2009). Statistical Methods for Practice and Research: A Guide to Data Analysis Using SPSS. In *Statistical Methods for Practice and Research: A Guide to Data Analysis Using SPSS* (pp. 108–120). SAGE Publications India Pvt Ltd. <https://doi.org/10.4135/9788132108306.n8>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0*. (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hunter, M., Uwaydah Mardini, R., El-Seblani, A., & Elsayed, S. (2020). Anti-corruption, Transparency and Accountability: Case Study of Healthcare in the Arab Countries. *Global Health Action*, 13(sup1), 1704529. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1704529>
- Kohler, J. C., & Dimancesco, D. (2020). The risk of corruption in public pharmaceutical procurement: how anti-corruption, transparency and accountability measures may reduce this risk. *Global Health Action*, 13(sup1), 1694745. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1694745>
- Koller, T., Clarke, D., & Vian, T. (2020). Promoting anti-corruption, transparency and accountability to achieve universal health coverage. *Global Health Action*, 13(sup1), 1700660. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1700660>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Publikasi Data Statistik Penindakan Korupsi*. KPK. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>
- Rompotis, G., & Balios, D. (2025). Benefits of IPSAS and their differences from IFRS: a discussion paper. *EuroMed Journal of Business*, 20(1), 94–113. <https://doi.org/10.1108/EMJB-07-2022-0139>
- Saputra, N. A. A., & Setiawan, D. (2021). Fiscal Decentralization, Accountability and Corruption Indication: Evidence from Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 29–40. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.29-40>
- Sari, N. P. (2024). Evaluasi Kebijakan Adopsi IPSAS di Indonesia: Sebuah Kajian Empirisme. *Jurnal Manajemen Dan Usahawan Indonesia*, 47(1). <https://doi.org/10.7454/jmui.v47i1.1085>

- Saud, S. F. S., & Furqan, A. C. (2024). The Effort to Realize Government Effectiveness Through Implementation Fully Accrual Accounting and Control Against Corruption. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 15(2), 128–136.
- Scannell, S., & Tawiah, V. (2024). A Thematic Literature Review on International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). *Public Organization Review*, 24(3), 1053–1075. <https://doi.org/10.1007/s11115-024-00773-1>
- Schmidthuber, L., Hilgers, D., & Hofmann, S. (2022). International Public Sector Accounting Standards (IPSASs): A systematic literature review and future research agenda. *Financial Accountability & Management*, 38(1), 119–142. <https://doi.org/10.1111/faam.12265>
- Setyawan, S., Juanda, A., & Inata, L. C. (2023). Peran Government Financial Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Kesiapan Adopsi Paripurna International Public Sector Accounting Standards. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1). <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i1.23903>
- Sutaryo, S., & Tri Amanu, K. (2020). Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik Atau Keuangan? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 43–60. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4619>
- Tawiah, V. (2023). The impact of IPSAS adoption on corruption in developing countries. *Financial Accountability & Management*, 39(1), 103–124. <https://doi.org/10.1111/faam.12288>
- Transparency International. (2024). CPI 2024 for Asia Pacific: Leaders failing to stop corruption amid an escalating climate crisis. *Transparency International The Global Coalition Against Corruption*. <https://www.transparency.org/en/news/cpi-2024-asia-pacific-leaders-failing-to-stop-corruption-amid-escalating-climate-crisis>
- Vian, T. (2020). Anti-corruption, transparency and accountability in health: concepts, frameworks, and approaches. *Global Health Action*, 13(sup1), 1694744. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1694744>
- Warkini, Bawono, I. R., & Restianto, Y. E. (2021). Pengaruh opini audit, sistem pengendalian intern pemerintah dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kasus korupsi di daerah. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 4(2), 113–127. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i2.8046>
- Wierzynska, A., Steingrüber, S., Oroxom, R., & Bauhoff, S. (2020). Recalibrating the anti-corruption, transparency, and accountability formula to advance public health. *Global Health Action*, 13(sup1), 1701327. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1701327>
- Williams, A. A., & Hussein, S. (2019). Impact of IPSAS adoption on transparency and accountability in managing public funds in developing countries: Evidence from Liberia. *Journal of Accounting and Taxation*, 11(6), 99–110. <https://doi.org/10.5897/JAT2019.0345>
- Zahriyah, A., Suprianik, Parmono, A., & Mustofa. (2021). *EKONOMETRIKA Teknik dan Aplikasi dengan SPSS*. Mandala Press.